

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks)**



**OLEH :  
AFIF FADHLY  
B 111 12 105**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

disusun dan diajukan oleh:

**AFIF FADHLY**

**B 111 12 105**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1291/PID.SUS.ANAK/2014/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

**AFIF FADHLY**  
**B111 12 105**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 1 Desember 2016  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**  
NIP. 19590317 198703 1 002

**Sekretaris**



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19660827199203 2 002

**A.n. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa skripsi atas mahasiswa :

Nama : Afif Fadhly

Nomor Induk : B 111 12 105

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan  
Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus  
Putusan Nomor 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi  
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 4 November 2016

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Muhadar, SH., MS.**

**NIP. 19590317 198703 1 002**

**Pembimbing II**



**Dr. Dara Indrawati, SH., MH.**

**NIP. 19660827 199203 2 002**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AFIF FADHLY
Nomor Pokok	: B11112105
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2016

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

Afif Fadhly (B 111 12 105) **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks).”** Dibimbing oleh bapak Prof. Dr. Muhadar, SH., MS. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Dara Indrawati, SH., MH. selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan No. 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, yaitu Pengadilan Negeri Makassar, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan, Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut. (1). Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 (tiga) dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu, Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Kedua, Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Subsidaire Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Lebih Subsidaire, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Ketiga, Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. (2). Dalam putusan No. 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks pengambilan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh Penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti Penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

## ABSTRACT

Afif Fadhly (B 111 12 105) **“Judicial Review of The Crime of Premeditated Murder Done by Minors (Case Study Court Decision No. 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks).”** Under the guidance of Prof. Dr. Muhadar, SH., MS. As supervisor I and Dr. Dara Indrawati, SH., MH. as supervisor II.

This study aims to determine the application of substantive criminal law and judges legal considerations regarding judges verdict towards minor as criminal in Court Decision No. 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks.

This research was conducted in Makassar City, namely District Court of Makassar, by using literal reviews as well as field observatory as sampling methods.

Based on the research, researcher gathered the following results. (1). The prosecutor gives 3 alternatively arranged indictments as follows: First, Primair Article 340 KUHP Jo. Article 56 Initial KUHP, Subsidzed Article 338 KUHP Jo. Article 56 Initial KUHP, more subsidize Article 351 paragraph (3) KUHP Jo. Article Initial KUHP. Second, Primair Article 340 KUHP Jo. Article 56 Secondary KUHP, Subsidize Article 338 KUHP Jo. Article 56 Secondary KUHP, more subsidized, Article 351 paragraph (3) KUHP Jo. Article 56 Secondary KUHP. Third, Primair Article 340 KUHP Jo. Article 55 paragraph (1) Secondary KUHP, Subsidize Article 338 KUHP Jo. Article 55 paragraph (1) initial KUHP, More Subsidized Article 351 paragraph (3) KUHP Jo. Article 55 paragraph (1) Initial KUHP. Among the articles' elements indicted by the prosecutor, which proven both conveniently and legally is Article 340 KUHP Jo. Article 56 Initial KUHP. Where the act and the articles' elements were perfectly matched. (2). In Court Decision No. 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks, the decision taken by the courts according to researcher was in conformity with the applied law as expected. In accordance to valid evidence regarding this case, which were witness's testimony along with testimony form accused as well as evidence of murder. Panel of judges based on the facts in the trial courts reputed that the accused could be justified for his actions on the basis that at the time of their actions the executant aware of the consequences thereof and did not carry out the attack, executant was performing their actions in good health and capable to take into consideration the elements against the law, hence no criminal removal allowed.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan segenap kemampuan yang penulis miliki dalam penyusunan skripsi secara maksimal. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak, sehingga melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis. **Ayahanda** tercinta **Dr. Muh. Basir Said, MA** dan **Ibunda** tercinta **Lily Nuryah** yang senantiasa mendoakan segala kebaikan untuk penulis, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Melalui kesempatan ini pula, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Universitas Hasauddin.



3. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku pembimbing I yang dalam kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Dr. Haeranah, S.H., M.H., Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku tim penguji, yang senantiasa memberikan saran/masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. H. Aminuddin Salle, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis atas waktu dan nasehat yang diberikan kepada penulis
8. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Bapak Mustari, S.H. selaku staff Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar yang telah memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar
10. Keluarga Besar Lorong Hitam (KBLH), khususnya kakanda senior yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sejak pertama kali menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Lorong Hitam (KBLH) 2012, Adhi, Agus, Akbar, Ainun, Andy, Arya, Fachrul, Fajar, Jaka, Marif, Siryan, Taufik,

Tri, Romi, Novy, Yani yang terus memberi masukan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Segenap teman-teman Petitum 2012 yang merupakan angkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersama-sama dengan penulis dalam menempuh pendidikan, semoga sukses selalu mengiringi langkah kita semua.

13. Teman-teman INSIDER, Aji, Michael, Ocan, Wahyu, Safar, Imam, Kahfi, Kevin, Niswar, Zashya, Olda, Riri, Meity, Ilma, Dillah yang terus memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Mirda Rezki Saputri yang telah membantu dan selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan do'a, motivasi, serta sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini.

Segenap kemampuan telah penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik yang bersifat konstruktif akan menjadi masukan yang berguna bagi penulis menuju kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah di berikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 29 Desember 2016

Penulis,

Afif Fadhly

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Tinjauan Yuridis .....	7
B. Tindak Pidana .....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	10
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	14
C. Pembunuhan Berencana .....	17
D. Penyertaan (Deelneming) .....	26
1. Pengertian Penyertaan .....	26
2. Bentuk-bentuk Penyertaan .....	27
E. Tinjauan Umum Anak.....	34
1. Pengertian Anak .....	34
2. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak .....	40
3. Pertimbangan Pemidaan Anak .....	41
4. Jenis Pidana dan Tindakan Terhadap Anak .....	43

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Lokasi Penelitian .....	48
B. Jenis dan Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data .....	49
D. Teknik Analisis Data.....	49
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>51</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Kasus Putusan Nomor: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks ) .....	51
1. Posisi Kasus .....	51
2. Dakwaan Jaksa .....	52
3. Tuntutan Jaksa .....	65
4. Amar Putusan .....	66
5. Analisis Penulis.....	66
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Kasus Putusan Nomor: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks ) .....	72
1. Pertimbangan Hakim .....	72
2. Analisis Penulis .....	74
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah suatu negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan

dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu tindakan yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Apabila kita melihat kedalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.



Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan

berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dan konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus No. Putusan: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademis,

Secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teritoris bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana.

2. Secara praktis,

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktis hukum (Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat) serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis merupakan tinjauan yang dilakukan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil. Khusus dalam penelitian ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa yang melakukan tindak pidana, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan hukuman/sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

#### **B. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang merupakan pengertian yang cukup banyak dan luas sehingga menimbulkan berbagai istilah di kalangan para sarjana hukum. Namun arti tindak pidana tersebut pada dasarnya adalah sama sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut mana para pakar hukum memandang.

Tindak pidana (*delik*) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang juga di pakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya

di singkat KUHP. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit*.

Di dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat di kemukakan dalam beberap buku huku pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang bolehdi hukum, pelanggaran yang dapat di hukum dan pelanggaran pidanaan.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis mengemukakan beberapa pandangan ahli hukum, antara lain: Simons (Zainal Abidin, 2007:224), berpendapat bahwa *strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang di makusd oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *doluz* (sengaja) dan *ulpa late* (alpa dan lalai).

Kemudian menurut Moeljatno (2005:59) perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

*Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi :

- a. Diancam dengan pidana dengan hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dianggap bertanggung jawab dengan perbuatannya

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

- c. Perbuatan dilakukan oleh seorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

### **a. Ada perbuatan**

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdibagi :

1. (*Commission/act*), yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagai pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif)
2. (*Omission*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagai pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

### **b. Ada Sifat Melawan Hukum**

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan :

Ke-1 : Bertentangan dengan hukum (objektif)

Ke-2 : Bertentangan dengan hak (subjek) orang lain

Ke-3 : Tanpa hak.

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut :



“Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wedderechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wedderechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”

Melihat uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum ada 2 (dua) macam yakni :

1. Sifat Melawan Hukum Formil (*Formale wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

## 2. Sifat Melawan Hukum Materiil (*Materiel wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara *eksplisit* maupun *emplisit* ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang *eksplisit* maupun *emplisit* dalam suatu pasal masih dalam perbedaan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di depan pengadilan. Adanya sifat melawan hukum yang di cantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini

disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara *eksplisi* misalnya pada pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.

c. Tidak Ada Alasan Pembena

1. Daya Paksa Absolute

Satchochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolute* sebagai berikut :

“Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.”

2. Pembelaan terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodwear*) dirumuskan dalam KUHP pasal 49 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan

kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum.”

Pakar-pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu :

- a. Harus ada serangan
- b. Terhadap serangan itu harus diadakan pembelaan
- c. Pembelaan dilakukan dengan serangan setimpal
- d. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau oranglain, perikesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.

### **3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

#### **1. Keadaan Jiwanya**

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus-menerus atau sementara (*temporal*).
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gau, idiot, imbecile*, dan sebagainya) dan

- Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dalam keadaan sadar.

## 2. Kemampuan Jiwanya

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidanya seseorang di haruskan adanya kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang di uraikan sebagai berikut :

### a. Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut Ciriminal Wetboek Nederland tahun 1809 pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau di perintahkan oleh undang-undang.

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

- Kesengajaan dengan insaf pasti (*Opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Dilihat dari segi “kesengajaan (*dolus/opzet*)” maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas :

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
3. Dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
5. Menganjurkan atau membantu orang lain untuk bunuh diri

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang di sebabkan kurangnya sikap hati-hati kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :

1. Daya paksa relatif
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas

Menurut Moeljanto (2005:69), unsur atau elemen perbuatan pidana (tindak pidana) adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhlwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

### **C. Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena



salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu.

Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan,

seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338.

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka.

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkannya

dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa

melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu , dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesagesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain:

“dengan direncanakan terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”

M. H. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung: 2005: 31), mengutarakan “direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai berikut:

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”

Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu ada dalam hatisangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah pasti merupakan moord (murder) tetapi tidak mesti ada rencana.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK (Adami Chazawi: 2007: 85) menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk opzet, tapi cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

- a. “Opzet”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk (de vorm waarin opzet wordt gevormd), yaitu harus dalam keadaan yang tenang,
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba.

Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

Umumnya pembunuhan dengan racun merupakan moord atau difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman. Begitu pula pembunuhan dengan menggunakan bom (rakitan).

Contoh “seseorang menyuntikkan racun ke sebuah nenas, lalu menyerahkan kepada orang lain dan dimakan yang mengakibatkan

kematiannya”. Jelas pembunuhan yang difikirkan lebih dulu karena harus mencari racun dan berfikir dimasukkan ke mana.

Sebaiknya dalam KUHP baru pun diciptakan secara khusus pemberatan pidana terhadap pembunuhan orang tua atau mertua garis lurus ke atas, misalnya dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, karena kita adalah orang timur yang sangat menghormati orang tua. Melawan orang tua saja sudah dipandang sebagai perbuatan durhaka, apalagi membunuh dengan sengaja.

Dalam KUHP Federasi Rusia, delik pembunuhan dengan pemberatannya, diatur secara terperinci dan beberapa macam. Dikenal:

1. Pembunuhan dua atau lebih orang (di Indonesia dan Belanda berlaku aturan *concursum* atau gabungan tindak pidana dengan penambahan pidana dengan sepertiga.
2. Pembunuhan terhadap orang atau keluarganya dalam aktivitas resmi orang itu atau dalam menjalankan tugas publik.
3. Pembunuhan terhadap orang yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan tidak berdaya dan juga pembunuhan melalui penculikan atau untuk menahan sandera.
4. Pembunuhan terhadap perempuan yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan hamil.
5. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat kejam.

6. Pembunuhan yang dilakukan secara umum dan sangat berbahaya.
7. Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui persekongkolan atau kelompok terorganisasikan.
8. Pembunuhan dengan motif tanpa kasihan dengan menyewa, atau disertai dengan perampokan dengan kekerasan, pemerasan atau secara bandit.
9. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat jahat.
10. Pembunuhan yang dilakukan untuk menyembunyikan kejahatan lain atau untuk memudahkan pelaksanaannya dan juga pembunuhan yang disertai dengan perkosaan atau tindakan seksual yang lain.
11. Pembunuhan yang dilakukan karena alasan nasional, rasial, atau kebencian agama atau permusuhan darah.
12. Pembunuhan dengan tujuan untuk memperoleh organ atau jaringan tubuh.

Oleh karena semua gejala pembunuhan kejam seperti ini terjadi juga di Indonesia, seperti pembunuhan yang diikuti mutilasi, maka perlu difikirkan, bahwa pemberatan pidana delik pembunuhan dirinci juga dalam KUHP baru. Untuk sementara perlu hal semacam ini dijadikan pedoman pemidanaan delik pembunuhan sebagai “hal-hal yang memberatkan pidana” dalam pertimbangan hakim.



## **D. Penyertaan (Deelneming)**

### **1. Pengertian Penyertaan**

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerja sama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam sistem kita KUHP, Penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum. Adapun beberapa pakar hukum pidana yang memberikan penafsiran sebagai berikut :

**Moeljatno** (1985: 63) merumuskan:

Ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, di luar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.

Lebih lanjut **S.R Sianturi** (1983: 338) memberikan penafsiran:

Makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian dalam mewujudkan suatu tindak pidana.

Sedangkan **Wirjono Prodjodikoro** (1986: 108) mengartikan penyertaan:

Penyertaan sebagai turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

## **2. Bentuk-bentuk Penyertaan**

Bentuk-bentuk penyertaan seperti yang diatur dalam buku I ketentuan umum Bab V Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum yakni *daders* atau *principals* dan *accessories*.

Rumusan Pasal 55 :

- 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
  - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
  - b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan member kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan
- 2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Rumusan Pasal 56 :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- 2) Barangsiapa dengan sengaja member kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa penyertaan dalam arti luas meliputi :

a. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 terdiri :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);
4. Orang yang menngerakkan/membujuk (*uitlokker*);

dan

b. Pembantu (*medeplichtige*).

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan;
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Selanjutnya akan dibahas tentang masing-masing bentuk penyertaan tersebut :

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Barda Nawawi Arief (1993 : 30) menyatakan bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Selanjutnya Sianturi (1993 : 339) menyatakan bahwa petindak adalah barangsiapa yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur delik (termasuk unsur subyek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

## 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Menurut Barda Nawawi Arief (1993 : 31) bahwa *doenpleger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian :

a. Pada *doenpleger* (menyuruh melakukan) ada 2 (dua) pihak, yakni :

1. Pembuat langsung (*onmiddelijke dader/auctor psysicus/ manus ministra*)
2. Pembuat tidak langsung (*middelijke dader doenpleger/auctor intelektualis/moralis/manus domina*)

b. Pada *doen pleger* unsur-unsur sebagai berikut :

1. Alat yang dipakai adalah manusia;
2. Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati);
3. Alat yang mati itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak dipidana). Unsur ke tiga ini merupakan ciri-ciri dari *doen pleger*.

Hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan ( Barda Nawawi Arief, 1993 : 31) ialah:

1. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (Pasal 44 KUHP);
2. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Bila ia melakukannya atas perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
4. Bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik; misalnya A menyuruh B untuk menguangkan pos wissel yang tanda tangannya dipalsukan oleh A, sedangkan B tidak mengetahui pemalsuan tersebut.
5. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan tersebut; misalnya A menyuruh B (seorang kuli) untuk mengambil barang dari suatu tempat, B mengambilnya untuk diserahkan kepada A dan ia sama sekali tidak mempunyai maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri).

Selanjutnya Barda Nawawi Arief (1993 : 31) mengatakan bahwa dalam hal pembuat materiil (alat) seorang yang belum cukup umur (anak), maka tidak ada menyuruh melakukan.

### 3. Orang turut serta / bersama-sama (*medepleger*)

Undang-undang (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang turut serta (*medepleger*). Menurut MvT bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan

sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menurut Pompe (Barda Nawawi Arief, 1993 : 33) bahwa turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada 3 (tiga) kemungkinan :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur tindak pidana/delik, misalnya 2 (dua) orang dengan dengan melakukan pencurian di sebuah gudang beras.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana/delik, sedang yang lain tidak, misalnya 2 (dua) orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A menyenggol orang yang menjadi sasaran sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut)
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur tindak pidana/delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana, misalnya dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke-5 di mana salah seorang melakukan pengrusakan pintu rumah yang menjadi sasaran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-

barang yang kemudian diberikan kepada kawannya yang merusak pintu tadi.

Untuk adanya *medepleger* :

1. Ada kerja sama secara sadar;
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik

Barda Nawawi Arief (1993 : 34) menyatakan bahwa adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu, cukup bila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat) dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

#### 4. Penganjur/Pembujuk (*uitlokker*)

Penganjur (*uitlokker*) ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh KUHP. Syarat penganjuran/pembujukan yang dapat dipidana :

1. Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang terlarang/tindak pidana;
2. Menggerakkan dengan menggunakan upaya-upaya (sarana-sarana) seperti tersebut dalam undang-undang (bersifat limitatif, yakni pemberian, perjanjian,

salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan)

3. Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan oleh karena hal-hal tersebut dalam nomor satu dan nomor dua;

4. Si pembuat materiil harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana

5. Pembantuan (*medeplichtige*)

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Tetapi dilihat dari pertanggung jawaban *accessoir*, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.

Menurut jenisnya menurut Pasal 56 KUHP, ada dua jenis pembantuan :

1. Waktunya : pada saat kejahatan dilakukan;

Caranya : tidak ditentukan secara limitatif (membatasi) dalam undang-undang;

2. Waktunya : sebelum kejahatan dilakukan;



Caranya : ditentukan secara limitatif dalam undang-undang (yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan).

## **E. Tinjauan Umum Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh manusia. Selain itu juga anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Pasal 330 KUHPerdara dapat kita lihat kriteria orang belum dewasa. Pasal 330 KUHPerdara (R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1981 : 98) berbunyi :

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam belum dewasa. Mereka yang belum dewasa tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Ketentuan dalam pasal 330 KUHPerdara ini banyak berlaku bagi orang Eropa dan golongan Timur Asing

(Tionghoa), sehingga bagi golongan Bumi putra (Indonesia) diberikan Staatsblad 1917 No. 138 kemudian dicabut dan diganti staatsblad 1931 No. 54 (R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1981 : 99) yang berbunyi :

Apabila peraturan undang-undang memakai istilah belum dewasa maka sekedar mengenai Bangsa Indonesia dengan istilah yang dimaksudkan segala orang yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur dua puluh satu tahun maka tidaklah mereka kembali dalam istilah belum dewasa.

Ketentuan pasal 330 KUHPPerdata tersebut diatas, maka batasan umur sehingga seseorang dikategorikan anak masih di bawah umur yaitu yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak dahulu kawin.

Sedangkan dalam KUHP memberikan pengertian mengenai anak yaitu dengan memberikan batasan umur sehingga dalam hal penentuan, ada perbedaan antara pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa.

Dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pengertian anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, hal ini juga tidak terlepas dengan adanya undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sehingga mempengaruhi definisi anak dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

1. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

2. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

#### 4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Menurut KUHAP apabila seorang anak yang telah berumur di atas 16 (enam belas) tahun pada waktu melakukan tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran), maka tuntutananya sama dengan yang diberlakukan pada orang dewasa, jadi dianggap telah dewasa dan bagi orang yang belum mencapai umur enam belas tahun pada waktu melakukan perbuatan yang dapat di hukum, maka Hakim dapat memilih 3 alternatif yaitu :

1. Dikembalikan kepada orang tuanya / walinya
2. Ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah
3. Menjatuhkan pidana (Bustaman, H.Mursiah, 1988)

Menurut Poerwadaminta (1990 : 813), mengklarifikasikan batas usia seseorang sebagai berikut :

- Remaja adalah mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin

- Muda (tentang anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan)
- Mulai dewasa, yaitu mulai terbit rasa cinta birahi atau waktu anak-anak mulai terbit rasa cinta birahi.

Aristoteles (Sofyan S. Willis, 1987 : 22), membagi tiga fase perkembangan manusia, adalah sebagai berikut :

1. 0 – 7 tahun = masa anak-anak
2. 7 – 14 tahun = masa sekolah
3. 14 – 21 tahun = masa remaja/pubertait

Zakiah Daradjat (1982 : 6 -7), berpendapat sebagai berikut :

Jika di pandang dari segi psikologi, maka batas usia remaja lebih banyak bergantung kepada keadaan masyarakat dimana remaja itu hidup. Yang dapat ditentukan dengan pasti adalah permulaan puber pertama atau mulainya perubahan jasmani dan anak-anak menuju dewasa kira-kira umur dua belas tahun atau awal tiga belas tahun. Akan tetapi akhir masa remaja tidak sama atau dengan yang lainnya.

Pendapat tersebut menentukan bahwa remaja adalah seorang dalam usia tradisi, yang telah meninggalkan usia kanak-kanak dan masih penuh ketergantungan (1982 : 6-7).

Lain halnya dengan pendapat Surigi (Romli Atmasasmita, 1987 : 34 ) bahwa :

“Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru dewasa bila proses perkembangannya dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan Negara-negara barat lainnya, tetapi atas dasar Biologis batas 18 tahun sampai 20 tahun yang lebih tepat” (1987 : 34).

Pendapat Surigi di atas, menekankan bahwa selama berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan pada diri seseorang, maka ia masih termasuk dalam kategori anak-anak. Sementara itu batas usia anak, remaja, dan dewasa dengan bertitik tolak pada usia remaja, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yulia D. Gunarsa (1983 : 203) bahwa :

“Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yakni antara 12 tahun sampai 21 tahun”.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum, maka dapat

disimpulkan bahwa pengertian anak di bawah umur adalah seseorang yang di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 1 menyebutkan pengertian seorang anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan dalam undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Namun dengan adanya putusan dari MK dalam putusannya menyatakan batasan usia anak yang bisa di mintai pertanggungjawaban pidana 12 tahun.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

## **2. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak**

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi *instrinsik* dan motivasi *ekstrinsik* yang menyebabkan kenakalan anak :

a. Motivasi *Instrinsik* dari kenakalan anak-anak lain ialah :

1. Faktor *Intelegentia*

2. Faktor usia

3. Faktor kelamin
  4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
- b. Yang termasuk motivasi *Ekstrinsik* adalah :
1. Faktor rumah tangga
  2. Faktor pendidikan dan sekolah
  3. Faktor pergaulan anak
  4. Faktos mass media

### **3. Pertimbangan Pemidanaan Anak**

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan.

Dalam hal ini hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak maka ada tiga hal yang perlu di perhatikan :

- a) Sifat kejahatan yang di jalankan
- b) Perkembangan jiwa si anak
- c) Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya

Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan



tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat *case study* tentang anak dalam sidang.

Adapun yang tercantum dalam *case study* ialah gambaran keadaan si anak berupa :

- a) Masalah sosialnya
- b) Kepribadiannya
- c) Latar belakang kehidupannya, misalnya :
  - 1. Riwayat sejak kecil
  - 2. Pergaulannya didalam dan diluar rumah
  - 3. Keadaan rumah tangga si anak
  - 4. Hubungan antara bapak ibu dan si anak
  - 5. Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain
  - 6. Latar belakang saat dilaksanakannya tindak pidana tersebut

*Case study* ini sangat besar pengaruhnyaterhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat *case study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan *case study*, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam

saja dan biasanya dalam *case study* petugas BISPA menyarankan kepada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan

#### **4. Jenis-jenis Pidana dan Tindakan terhadap Anak**

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

##### **a) Pidana Pokok**

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu :

##### **1. Pidana Penjara**

Pidana penjara berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh tahun). Kecuali itu pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.

Terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak, hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).

Mengenai ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara dari orang dewasa
- Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- Apabila anak tersebut mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan

kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”.

- Apabila anak tersebut mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.

## 2. Pidana Kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).

## 3. Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang pengadilan anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang

bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (vide penjelasan Pasal 28 ayat (2)).

Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (vide penjelasan Pasal 23 ayat (3)). Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

#### 4. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut :

- Lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa
- Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

#### 5. Pidana Tambahan

Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa :

- Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- Pembayaran ganti rugi

#### 6. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah :

- Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar karena dapat memberikan data dalam menyelesaikan proposal ini. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, data-data tersebut berupa data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

##### **1. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi di Pengadilan Negeri Makassar, utamanya Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili kasus ini.

##### **2. Data sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari telaah pustaka yakni buku-buku hukum, jurnal hukum, dan dokumen yang telah ada serta

relevan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi.

#### **a. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dikaji penulis, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Penelitian pustaka (*Library Research*)**

Dalam penelitian pustaka, penulis melakukan pengumpulan data melalui berbagai literature baik berupa buku, jurnal, majalah, koran, dan karya tulis lainnya serta beberapa literature lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi pembahasan penulis. Sehubungan dengan itu, penulis akan mengadakan studi pustaka di perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang penulis anggap memiliki referensi yang cukup mengenai materi dalam penulisan skripsi ini

##### **2. Penelitian lapangan (*Field Research*)**

Dalam hal ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan objek yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dilakukan dengan teknik interview (wawancara) secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

#### **b. Teknik Analisis Data**

Agar perolehan data primer dan sekunder seperti yang tersebut diatas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang



terpadu dan sistematis maka penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang dikaji.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Kasus Putusan Nomor: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks )**

##### **1. Posisi Kasus**

- Pada hari senin tanggal 16 juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita terjadi pembunuhan yang direncanakan, terdakwa Rusdi alias Dudding diatas motor dengan membonceng terdakwa Risal bin Dg.Sahabu alias Icca dengan pisau jame-jame yang bersarung yang di bawa masing-masing diselipkan di dalam baju. Terdakwa Risal Dg. Taba dengan mengendarai sepeda motor sendiri dengan parang diselipkan di dalam baju. Terdakwa Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa diatas motor dengan pengendara lelaki Riswandi alias Dandi (DPO) dengan parang masing-masing diselipkan dalam baju berangkat bersama-sama menuju kampung bangkala tempat keberadaan/tempat tinggal Abidini dan istrinya (korban Eka Indriani).
- Terdakwa Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dengan pisau jame-jame bersarung yang masih diselipkan di dalam baju. Terdakwa Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa dengan parang yang di bungkus kertas yang masih di selipkan dala baju. Terdakwa Rusdi alias Dudding dengan tangan kanan memegang pisau jame-jame yang telah dikeluarkan dari sarungnya. Riswandi alias Dandi (DPO) dengan parang masih di selipkan dalam baju. Terdakwa Risal Dg. Taba dengan parang yang bersarung masih diselipkan dalam baju setelah memarkir kendaraan di kampung bangkala berjalan menuju tempat tinggal korban bersama suaminya.
- Terdakwa Rusdi alias Dudding dengan tangan kanan memegang pisau pemotong daging yang sudah dikeluarkan dari sarungnya, disusul tersangka Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dengan tangan kanan memegang pisau pemotong daging yang sudah di keluarkan dari sarungnya, disusul tersangka Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa dengan tangan kanan memegang parang yang sudah terhunus. Terdakwa Risal Dg. Taba dengan parang masih di selipkan dalam baju naik kelantai atas tepat didepan kamar korban. Riswandi alias Dandi (DPO) dengan tangan kanan memegang parang yang terhunus menunggu di bawah tangga.
- Korban Eka Indriani mencoba kabur melalui pintu yang telah di dobrak. Terdakwa Rusdi alias Dudding tepat berada di arah keluarnya korban menahan korban dengan mengarahkan pisau

pemotong daging keatas. Terdakwa Risal Dg. Taba dengan tangan kanan mengayunkan parang yang telah dipegang ke arah leher korban Eka Indriani hingga korban kembali masuk kedalam kamar. Terdakwa Risal Dg. Taba masuk kedalam kamar dengan tangan kanan yang memegang parang melakukan pemarkan kearah pundak tepat di bawah leher korban. Terdakwa Rusdi alias Dudding dan Terdakwa Risal Bin Dg. Sahabu alias Icca berdiri didepan pintu dengan tangan kanan masing-masing memegang parang yang terhunus melihat korban diparangi dan berjaga-jaga kalau ada suami korban keluar dari ruang kamar. Terdakwa Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa turun dari depan kamar untuk menjaga dan berdiri di pertengahan tangga mengarah kesamping dengan tangan kanan memegang parang yang terhunus. Pada saat tangan kiri korban terangkat di sekitar bagian kepala, terdakwa Risal Dg. Taba mengayunkan parangnya kena di bagian lengan tangan kiri, lalu korban Eka Indriani pun terjatuh kelantai kamar kemudian terdakwa Risal Dg. Taba mengayunkan kembali parangnya kearah badan korban secara berkali-kali dan mengenai bagian tubuh korban Eka Indriani.

## **2. Dakwaan Jaksa**

Terdakwa Rusdi alias Dudding diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk: PDM-492/Mks/Ep/07/2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

- Bahwa terdakwa Rusdi alias Dudding, pada hari senin tanggal 16 juni 2014 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2014 bertempat dijalan Bangkala BTP Blok D Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Eka Indriani, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca sedang berada didepan rumah korban yang mana saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca melihat ke arah suami korban yang mana saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca

melihat kearah suami korban yakni saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin sehingga saat itu saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin mengatakan kepada saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca “kenapa kamu lihat lihati saya” dan dijawab oleh saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dengan mengatakan “tidak ji baruki kulihat dikampung ini, mauja berteman” kemudian saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin mendatangi terdakwa dan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca namun pada saat itu terdakwa dan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dan Riswandi alias Dandi (DPO) kembali mendatangi rumah korban, dan sesampainya dirumah korban, terdakwa bersama saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dan Riswandi alias Dandi langsung naik ke kamar kost korban yang berada dilantai dua kemudian saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca mengetuk-ngetuk pintu kamar korban sehingga saat itu korban membuka pintu kamarnya, lalu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bertanya kepada korban dengan mengatakan “mana suamimu” dan dijawab oleh korban “ada” selanjutnya korban membangunkan saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin lalu saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin keluar dari kamarnya dengan membawa parang, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dan Riswandi alias Dandi langsung turun dari lantai dua dan saat berada dibawah, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca memanggil turun saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin dengan mengatakan “turun ki dulu daeng, ada saya tanyakan ki” secara berulang kali namun saat itu saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin tidak mau turun sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, serta Riswandi alias Dandi kembali naik kelantai dua dengan masing-masing membawa badik sehingga saat itu saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin menendang kearah Risal bin Dg. Sahabu alias Icca selanjutnya saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, serta Riswandi alias Dandi kembali turun dari lantai dua dan saat berada dibawah, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca melempar kertas yang mengenai dinding rumah korban lalu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca berteriak mengatakan “turunko sundala, gondrong kongkong” selanjutnya saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bertanya kepada korban “siapa nama bapakmu, kenapako mau dikasih jadi budak” yang mana pada saat itu korban

- mengatakan “Dg. Said Tatto, dia suamiku, kalau suamiku kau ganggu, saya bunuh kau” hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dan saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin dengan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dimana saat jadi pertengkaran mulut tersebut datang saksi Mursalim dan menyuruh saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca untuk pulang sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, serta Riswandi alias Dandi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian keesokan harinya saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca menceritakan hal tersebut kepada saksi Risal Dg. Taba dengan mengatakan “ada masalahku dengan orang dan orang itu mauka na tikam” sehingga saat itu saksi Risal Dg. Taba mengatakan “kenapa na mauko na tikam, kalau kamu mauji bicara baik-baik” selanjutnya saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca kembali mengatakan kepada saksi Risal Dg. Taba “memang itu Abidin mau menguasai itu kampung, dia tidak takut sama semua orang bangkala, anak-anak bangkala bencong semua” sehingga atas pernyataan tersebut saksi Risal Dg. Taba ikut emosi.
  - Selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 21.00 wita saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa serta Riswandi alias Dandi kembali mendatangi rumah korban dan sesampainya di rumah korban, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca mengetuk pintu kamar korban namun saat itu korban tidak membuka pintu kamarnya sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, serta Riswandi alias Dandi meninggalkan rumah korban.
  - Kemudian pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar jam 19.30 wita saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca mendapat informasi bahwa korban dan suaminya yakni saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin telah ada di rumahnya sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca menyampaikan kepada saksi Risal dg. Taba bahwa saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin telah ada di rumahnya sehingga atas penyampaian tersebut dan mendengar cerita tersebut sebelumnya yang diceritakan oleh saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca tentang perbuatan saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal Dg. Taba, dan terdakwa serta Riswandi alias Dandi mendatangi rumah korban dengan menggunakan sepeda motor dengan masing-masing membawa pisau dan parang yang mana saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, sedangkan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias

Icca berboncengan dengan Riswandi alias Dandi sedangkan saksi Risal Dg. Taba mengendarai sendiri sepeda motornya, dan sesampainya di rumah korban, terdakwa bersama dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dan saksi Risal Dg. Taba naik ke kamar korban dilantai dua yang masing-masing memegang pisau serta parang sedangkan Riswandi alias Dandi menunggu dan berjaga-jaga ditangga, selanjutnya terdakwa mengetuk pintu kamar korban secara berulang kali sambil mengatakan “mana suamimu” namun saat itu tidak ada jawaban dari dalam kamar sehingga saat itu saksi Risal Dg. Taba sambil memegang parang dan langsung menendang pintu kamar korban hingga pintu kamar korban terbuka dimana saat pintu kamar korban terbuka saat itu korban berusaha untuk lari namun ditahan oleh terdakwa dan saksi Risal Dg. Taba selanjutnya saksi Risal Dg. Taba langsung mengayunkan parangnya ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dikasur sedangkan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa dan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca berjaga-jaga diluar kamar sambil memegang parang yang dibawanya, dan pada saat korban telah terjatuh dikasur lalu saksi Risal Dg. Taba kembali memarangi korban secara berulang kali yang mengenai lengan kanan atas sisi dalam, lengan kanan atas sisi luar, lengan kanan bawah, punggung kiri atas, pergelangan tangan kanan, lengan kiri bawah dan lutut kiri korban, setelah itu saksi Risal Dg. Taba bersama dengan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca, saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, dan terdakwa serta Riswandi alias Dandi lari meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa adapun akibat luka yang dialami oleh korban tersebut mengakibatkan nyawa korban tidak dapat tertolong dan meninggal ditempat tersebut dimana berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar nomor : Ver/09-Mt/VI/2014/Rumkit tanggal 30 Juni 2014 dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah samping kepala kiri sampai daerah pipi kiri, ukuran 18,4 cm x 4,2 cm, disertai retaknya tulang samping kepala kiri (os.temporal sinistra) dan putusnya pembuluh darah (arteri dan vena temporalis superficialis).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan atas sisi dalam, ukuran 20,1 cm x 7,5 cm, disertai patahnya tulang lengan kanan atas (os.humerus dextra) dan putusnya pembuluh darah (arteri dan vena branchialis).

- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan atas sisi luar, ukuran 20,3 cm x 10,6 cm, disertai putusnya pembuluh darah (arteri dan vena branchialis).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan bawah, ukuran 10,8 cm x 3,2 cm, disertai patahnya tulang (os.radialis dan ulna dextra) dan putusnya pembuluh darah (arteri dan vena radialis serta ulnaris dextra).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah punggung kiri atas, ukuran 35,1 cm x 10,8 cm, disertai retaknya tulang belikat (os.scapula sinistra).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah pergelangan tangan kanan sampai daerah telapak tangan kanan, ukuran 10,3 cm x 3,2 cm, disertai patahnya tulang rangka tangan dan putusnya nadi-nadi jari (arteri digitales palmares dextra).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada lengan kiri bawah sisi belakang, ukuran 10,9 cm x 3,6 cm, disertai retak tulang hasta (os.ulna sinistra).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada lutut kiri, ukuran 3,4 cm x 1,2 cm, disertai retaknya tempurung lutut (os.patella sinistra).
- Tampak tanda-tanda pendarahan hebat yaitu selaput kelopak mata tampak pucat serta kuku-kuku jari tangan dan kaki tampak pucat.

#### **Kesimpulan :**

Ditemukan beberapa luka bacok berat pada daerah kepala kiri, lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lengan kiri bawah, punggung kiri atas, dan lutut kiri akibat kekerasan tajam yang kuat dan keras, sehingga mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.**

#### **SUBSIDAIR**

- Bahwa terdakwa Rusdi alias Dudding, pada hari senin tanggal 16 juni 2014 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2014 bertempat dijalan Bangkala BTP Blok D Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Eka Indriani, perbuatan mana

dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca sedang berada didepan rumah korban yang mana saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca melihat ke arah suami korban yang mana saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca melihat kearah suami korban yakni saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin sehingga saat itu saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin mengatakan kepada saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca “kenapa kamu lihat lihati saya” dan dijawab oleh saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dengan mengatakan “tidak ji baruki kulihat dikampung ini, mauja berteman” kemudian saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin mendatangi terdakwa dan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca namun pada saat itu terdakwa dan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dan Riswandi alias Dandi (DPO) kembali mendatangi rumah korban, dan sesampainya dirumah korban, terdakwa bersama saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dan Riswandi alias Dandi langsung naik ke kamar kost korban yang berada dilantai dua kemudian saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca mengetuk-ngetuk pintu kamar korban sehingga saat itu korban membuka pintu kamarnya, lalu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bertanya kepada korban dengan mengatakan “mana suamimu” dan dijawab oleh korban “ada” selanjutnya korban membangunkan saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin lalu saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin keluar dari kamarnya dengan membawa parang, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dan Riswandi alias Dandi langsung turun dari lantai dua dan saat berada dibawah, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca memanggil turun saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin dengan mengatakan “turun ki dulu daeng, ada saya tanyakan ki” secara berulang kali namun saat itu saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin tidak mau turun sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, serta Riswandi alias Dandi kembali naik kelantai dua dengan masing-masing membawa badik sehingga saat itu saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin menendang kearah Risal bin Dg. Sahabu alias Icca selanjutnya saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, serta Riswandi



- alias Dandi kembali turun dari lantai dua dan saat berada dibawah, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca melempar kertas yang mengenai dinding rumah korban lalu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca berteriak mengatakan “turunko sundala, gondrong kongkong” selanjutnya saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bertanya kepada korban “siapa nama bapakmu, kenapako mau dikasih jadi budak” yang mana pada saat itu korban mengatakan “Dg. Said Tatto, dia suamiku, kalau suamiku kau ganggu, saya bunuh kau” hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dan saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin dengan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dimana saat jadi pertengkaran mulut tersebut datang saksi Mursalim dan menyuruh saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca untuk pulang sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, serta Riswandi alias Dandi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian keesokan harinya saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca menceritakan hal tersebut kepada saksi Risal Dg. Taba dengan mengatakan “ada masalahku dengan orang dan orang itu mauka na tikam” sehingga saat itu saksi Risal Dg. Taba mengatakan “kenapa na mauko na tikam, kalau kamu mauji bicara baik-baik” selanjutnya saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca kembali mengatakan kepada saksi Risal Dg. Taba “memang itu Abidin mau menguasai itu kampung, dia tidak takut sama semua orang bangkala, anak-anak bangkala bencong semua” sehingga atas pernyataan tersebut saksi Risal Dg. Taba ikut emosi.
  - Selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 21.00 wita saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa serta Riswandi alias Dandi kembali mendatangi rumah korban dan sesampainya dirumah korban, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca mengetuk pintu kamar korban namun saat itu korban tidak membuka pintu kamarnya sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, serta Riswandi alias Dandi meninggalkan rumah korban.
  - Kemudian pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar jam 19.30 wita saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca mendapat informasi bahwa korban dan suaminya yakni saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin telah ada dirumahnya sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca menyampaikan kepada saksi Risal dg. Taba bahwa saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin telah ada dirumahnya sehingga atas penyampaian tersebut dan mendengar cerita tersebut sebelumnya yang diceritakan oleh saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca tentang perbuatan saksi Andi Zainal Abidin

alias Bidin sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal Dg. Taba, dan terdakwa serta Riswandi alias Dandi mendatangi rumah korban dengan menggunakan sepeda motor dengan masing-masing membawa pisau dan parang yang mana saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, sedangkan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca berboncengan dengan Riswandi alias Dandi sedangkan saksi Risal Dg. Taba mengendarai sendiri sepeda motornya, dan sesampainya di rumah korban, terdakwa bersama dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dan saksi Risal Dg. Taba naik ke kamar korban dilantai dua yang masing-masing memegang pisau serta parang sedangkan Riswandi alias Dandi menunggu dan berjaga-jaga ditangga, selanjutnya terdakwa mengetuk pintu kamar korban secara berulang kali sambil mengatakan “mana suamimu” namun saat itu tidak ada jawaban dari dalam kamar sehingga saat itu saksi Risal Dg. Taba sambil memegang parang dan langsung menendang pintu kamar korban hingga pintu kamar korban terbuka dimana saat pintu kamar korban terbuka saat itu korban berusaha untuk lari namun ditahan oleh terdakwa dan saksi Risal Dg. Taba selanjutnya saksi Risal Dg. Taba langsung mengayunkan parangnya ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dikasur sedangkan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa dan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca berjaga-jaga diluar kamar sambil memegang parang yang dibawanya, dan pada saat korban telah terjatuh dikasur lalu saksi Risal Dg. Taba kembali memarangi korban secara berulang kali yang mengenai lengan kanan atas sisi dalam, lengan kanan atas sisi luar, lengan kanan bawah, punggung kiri atas, pergelangan tangan kanan, lengan kiri bawah dan lutut kiri korban, setelah itu saksi Risal Dg. Taba bersama dengan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca, saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, dan terdakwa serta Riswandi alias Dandi lari meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa adapun akibat luka yang dialami oleh korban tersebut mengakibatkan nyawa korban tidak dapat tertolong dan meninggal ditempat tersebut dimana berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar nomor : Ver/09-Mt/VI/2014/Rumkit tanggal 30 Juni 2014 dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah samping kepala kiri sampai daerah pipi kiri, ukuran 18,4 cm x 4,2 cm, disertai retaknya tulang samping kepala kiri (os.temporal sinistra) dan putusnya pembuluh darah (arteri dan vena temporalis superficialis).

- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan atas sisi dalam, ukuran 20,1 cm x 7,5 cm, disertai patahnya tulang lengan kanan atas (os.humerus dextra) dan putusnya pembuluh darah (arteri dan vena branchialis).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan atas sisi luar, ukuran 20,3 cm x 10,6 cm, disertai putusnya pembuluh darah (arteri dan vena branchialis).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan bawah, ukuran 10,8 cm x 3,2 cm, disertai patahnya tulang (os.radialis dan ulna dextra) dan putusnya pembuluh darah (arteri dan vena radialis serta ulnaris dextra).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah punggung kiri atas, ukuran 35,1 cm x 10,8 cm, disertai retaknya tulang belikat (os.scapula sinistra).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah pergelangan tangan kanan sampai daerah telapak tangan kanan, ukuran 10,3 cm x 3,2 cm, disertai patahnya tulang rangka tangan dan putusnya nadi-nadi jari (arteri digitales palmares dextra).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada lengan kiri bawah sisi belakang, ukuran 10,9 cm x 3,6 cm, disertai retak tulang hasta (os.ulna sinistra).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada lutut kiri, ukuran 3,4 cm x 1,2 cm, disertai retaknya tempurung lutut (os.patella sinistra).
- Tampak tanda-tanda pendarahan hebat yaitu selaput kelopak mata tampak pucat serta kuku-kuku jari tangan dan kaki tampak pucat.

#### **Kesimpulan :**

Ditemukan beberapa luka bacok berat pada daerah kepala kiri, lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lengan kiri bawah, punggung kiri atas, dan lutut kiri akibat kekerasan tajam yang kuat dan keras, sehingga mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.**

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

- Bahwa terdakwa Rusdi alias Dudding, pada hari senin tanggal 16 juni 2014 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2014 bertempat dijalan Bangkala BTP Blok D Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidak-

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Eka Indriani, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca sedang berada didepan rumah korban yang mana saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca melihat ke arah suami korban yang mana saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca melihat kearah suami korban yakni saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin sehingga saat itu saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin mengatakan kepada saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca “kenapa kamu lihat lihati saya” dan dijawab oleh saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dengan mengatakan “tidak ji baruki kulihat dikampung ini, mauja berteman” kemudian saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin mendatangi terdakwa dan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca namun pada saat itu terdakwa dan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dan Riswandi alias Dandi (DPO) kembali mendatangi rumah korban, dan sesampainya dirumah korban, terdakwa bersama saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dan Riswandi alias Dandi langsung naik ke kamar korban yang berada dilantai dua kemudian saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca mengetuk-ngetuk pintu kamar korban sehingga saat itu korban membuka pintu kamarnya, lalu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bertanya kepada korban dengan mengatakan “mana suamimu” dan dijawab oleh korban “ada” selanjutnya korban membangunkan saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin lalu saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin keluar dari kamarnya dengan membawa parang, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dan Riswandi alias Dandi langsung turun dari lantai dua dan saat berada dibawah, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca memanggil turun saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin dengan mengatakan “turun ki dulu daeng, ada saya tanyakan ki” secara berulang kali namun saat itu saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin tidak mau turun sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, serta Riswandi alias Dandi

- kembali naik kelantai dua dengan masing-masing membawa badik sehingga saat itu saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin menendang kearah Risal bin Dg. Sahabu alias Icca selanjutnya saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, serta Riswandi alias Dandi kembali turun dari lantai dua dan saat berada dibawah, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca melempar kertas yang mengenai dinding rumah korban lalu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca berteriak mengatakan “turunko sundala, gondrong kongkong” selanjutnya saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bertanya kepada korban “siapa nama bapakmu, kenapako mau dikasih jadi budak” yang mana pada saat itu korban mengatakan “Dg. Said Tatto, dia suamiku, kalau suamiku kau ganggu, saya bunuh kau” hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dan saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin dengan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dimana saat jadi pertengkaran mulut tersebut datang saksi Mursalim dan menyuruh saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca untuk pulang sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, serta Riswandi alias Dandi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian keesokan harinya saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca menceritakan hal tersebut kepada saksi Risal Dg. Taba dengan mengatakan “ada masalahku dengan orang dan orang itu mauka na tikam” sehingga saat itu saksi Risal Dg. Taba mengatakan “kenapa na mauko na tikam, kalau kamu mauji bicara baik-baik” selanjutnya saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca kembali mengatakan kepada saksi Risal Dg. Taba “memang itu Abidin mau menguasai itu kampung, dia tidak takut sama semua orang bangkala, anak-anak bangkala bencong semua” sehingga atas pernyataan tersebut saksi Risal Dg. Taba ikut emosi.
  - Selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 21.00 wita saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa serta Riswandi alias Dandi kembali mendatangi rumah korban dan sesampainya dirumah korban, saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca mengetuk pintu kamar korban namun saat itu korban tidak membuka pintu kamarnya sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan terdakwa dan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, serta Riswandi alias Dandi meninggalkan rumah korban.
  - Kemudian pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar jam 19.30 wita saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca mendapat informasi bahwa korban dan suaminya yakni saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin telah ada dirumahnya sehingga saat itu saksi Risal bin Dg.

Sahabu alias Icca menyampaikan kepada saksi Risal dg. Taba bahwa saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin telah ada dirumahnya sehingga atas penyampaian tersebut dan mendengar cerita tersebut sebelumnya yang diceritakan oleh saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca tentang perbuatan saksi Andi Zainal Abidin alias Bidin sehingga saat itu saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca bersama dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, saksi Risal Dg. Taba, dan terdakwa serta Riswandi alias Dandi mendatangi rumah korban dengan menggunakan sepeda motor dengan masing-masing membawa pisau dan parang yang mana saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, sedangkan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca berboncengan dengan Riswandi alias Dandi sedangkan saksi Risal Dg. Taba mengendarai sendiri sepeda motornya, dan sesampainya dirumah korban, terdakwa bersama dengan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa , saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca dan saksi Risal Dg. Taba naik ke kamar korban dilantai dua yang masing-masing memegang pisau serta parang sedangkan Riswandi alias Dandi menunggu dan berjaga-jaga ditangga, selanjutnya terdakwa mengetuk pintu kamar korban secara berulang kali sambil mengatakan “mana suamimu” namun saat itu tidak ada jawaban dari dalam kamar sehingga saat itu saksi Risal Dg. Taba sambil memegang parang dan langsung menendang pintu kamar korban hingga pintu kamar korban terbuka dimana saat pintu kamar korban terbuka saat itu korban berusaha untuk lari namun ditahan oleh terdakwa dan saksi Risal Dg. Taba selanjutnya saksi Risal Dg. Taba langsung mengayunkan parangnya ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dikasur sedangkan saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa dan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca berjaga-jaga diluar kamar sambil memegang parang yang dibawanya, dan pada saat korban telah terjatuh dikasur lalu saksi Risal Dg. Taba kembali memarangi korban secara berulang kali yang mengenai lengan kanan atas sisi dalam, lengan kanan atas sisi luar, lengan kanan bawah, punggung kiri atas, pergelangan tangan kanan, lengan kiri bawah dan lutut kiri korban, setelah itu saksi Risal Dg. Taba bersama dengan saksi Risal bin Dg. Sahabu alias Icca, saksi Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, dan terdakwa serta Riswandi alias Dandi lari meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa adapun akibat luka yang dialami oleh korban tersebut mengakibatkan nyawa korban tidak dapat tertolong dan meninggal ditempat tersebut dimana berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar nomor : Ver/09-Mt/VI/2014/Rumkit tanggal 30 Juni 2014 dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah samping kepala kiri sampai daerah pipi kiri, ukuran 18,4 cm x 4,2 cm, disertai retaknya tulang samping kepala kiri (os.temporal sinistra) dan putusnya pembuluh darah (arteri dan vena temporalis superficialis).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan atas sisi dalam, ukuran 20,1 cm x 7,5 cm, disertai patahnya tulang lengan kanan atas (os.humerus dextra) dan putusnya pembuluh darah (arteri dan vena branchialis).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan atas sisi luar, ukuran 20,3 cm x 10,6 cm, disertai putusnya pembuluh darah (arteri dan vena branchialis).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan bawah, ukuran 10,8 cm x 3,2 cm, disertai patahnya tulang (os.radialis dan ulna dextra) dan putusnya pembuluh darah (arteri dan vena radialis serta ulnaris dextra).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah punggung kiri atas, ukuran 35,1 cm x 10,8 cm, disertai retaknya tulang belikat (os.scapula sinistra).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah pergelangan tangan kanan sampai daerah telapak tangan kanan, ukuran 10,3 cm x 3,2 cm, disertai patahnya tulang rangka tangan dan putusnya nadi-nadi jari (arteri digitales palmares dextra).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada lengan kiri bawah sisi belakang, ukuran 10,9 cm x 3,6 cm, disertai retak tulang hasta (os.ulna sinistra).
- Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada lutut kiri, ukuran 3,4 cm x 1,2 cm, disertai retaknya tempurung lutut (os.patella sinistra).
- Tampak tanda-tanda pendarahan hebat yaitu selaput kelopak mata tampak pucat serta kuku-kuku jari tangan dan kaki tampak pucat.

#### **Kesimpulan :**

Ditemukan beberapa luka bacok berat pada daerah kepala kiri, lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lengan kiri bawah, punggung kiri atas, dan lutut kiri akibat kekerasan tajam yang kuat dan keras, sehingga mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.**

ATAU

**PRIMAIR**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

**SUBSIDAIR**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

**LEBIH SUBSIDAIR**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

**PRIMAIR**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**LEBIH SUBSIDAIR**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**3. Tuntutan Jaksa**

Berdasarkan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rusdi alias Dudding bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi bantuan terhadap pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rusdi alias Dudding dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah.
  - 1 (satu) buah parang yang bersarung kayu dan bergagang kayu.



- 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu bersarung kertas putih.
  - 1 (satu) buah pisau besi putih bergagang dan bersarung kayu.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **4. Amar Putusan**

Adapun amar putusan pada perkara ini yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rusdi alias Dudding tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi bantuan terhadap pembunuhan berencana”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdi alias Dudding dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang telah dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna putih yang berlumuran darah
  - 1 (satu) buah parang yang bersarung kayu dan bergagang kayu
  - 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu dan bersarung kertas putih
  - 1 (satu) buah pisau besi putih bergagang dan bersarung kayu
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh H. Makmur,SH.,MH. sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Muhammad Ilyas B, SH.,MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muhammad Yusuf, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

#### **5. Analisis Penulis**

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya

Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Direncanakan terlebih dahulu
- d. Menghilangkan nyawa orang lain
- e. Yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Oleh sebab itu untuk membuktikannya, penulis akan mengkaji unsur unsur tersebut:

- a. Barang siapa

Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”.

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Rusdi alias Dudding adalah subjek

hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja

Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzettelijk*” haruslah menunjukkan adanya sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya.

Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati kenyataan bahwa pamarangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang dikehendaknya, hal ini dapat dilihat dari pamarangan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa. Terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya dapat membuat orang lain kehilangan nyawa tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu.

Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi.

c. Direncanakan terlebih dahulu

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya membunuh.

Bahwa diatas telah terungkap bahwa pamarangan yang dilakukan oleh terdakwa akibat merasa sakit hati oleh suami korban Andi Zainal Abidin.

Bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa niat untuk membunuh korban telah ada dan ia mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengurungkan niatnya, namun tidak dilakukannya dan ia dalam melakukan perbuatannya itu telah ada persiapan yaitu terdakwa dengan sengaja membawa parang sebelum berangkat kerumah korban, sehingga dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan.

d. Menghilangkan nyawa orang lain

Bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” didalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat, yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian, ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*)

antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat maka perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana uraian tersebut diatas telah menyebabkan orang lain yakni korban Eka Indriani meninggal dunia oleh karena mengalami luka sebagaimana visum et repertum yang diajukan dalam alat bukti surat.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Eka Indriani, sehingga terhadap unsur ini penulis berpendapat telah terpenuhi.

- e. Yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis, yaitu pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*). Kedua, pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan

kehendak jahat pembuat materil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur.

Bahwa setelah mengetahui korban dan suaminya telah berada dirumahnya kemudian terdakwa bersama dengan Risal Dg. Taba, Risal bin Dg. Sahabu alias Icca, Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, Riswandi alias Dandi mendatangi korban dirumahnya dengan masing-masing membawa parang dan saat telah berada dirumah korban terdakwa bersama dengan Risal Dg. Taba, Risal bin Dg. Sahabu alias Icca, Ryan Hidayat alias Dayat bin Dg. Lewa, Riswandi alias Dandi naik kerumah korban yang kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar korban secara berulang kali namun oleh korban tidak membukakan pintu sehingga Risal Dg. Taba mendobrak pintu kamar korban sehingga pintu kamar korban terbuka dimana saat pintu kamar korban terbuka Risal Dg. Taba langsung menebaskan parang yang dibawanya ke tubuh korban secara berulang kali sedangkan terdakwa bersama dengan Ryan Hidayat alias Dayat, Risal bin Dg. Sahabu alias Icca berjaga-jaga didepan kamar korban sambil memegang parang yang dibawanya.

Berdasarkan penjelasan Penulis diatas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks )**

**1. Pertimbangan Hakim**

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Adapun pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yakni senagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan beberapa saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing antara lain sebagai berikut : Saksi Stanis Jamun, Muhammad Fitrah dan Mursalim telah memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah dibuat pada saat terdakwa melakukan kejahatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka didapatlah fakta-fakta persidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukan barang bukti dipersidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jakasa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan Hakim yakin akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya kareanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkaranya.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih dibawah umur

## **2. Analisis Penulis**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan

benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan nomor : 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Lalu mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat

melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terakhir terdakwa masih dibawah umur sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor : 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 (tiga) dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu, Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Kedua, Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Lebih Subsidair, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Ketiga, Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

2. Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor : 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh Penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti Penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat

bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo

Persada : Jakarta.

------. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja

Grafindo Persada : Jakarta.

Amir Ilyas. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkan Education

dan Pukap Indonesia : Yogyakarta.

------. Dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana 2*, Rangkan

Education dan Pukap Indonesia : Yogyakarta.

Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika : Jakarta.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta :

Jakarta.

------. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika :

Jakarta.

Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta :

Jakarta.

Anwar. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cipta

Adya Bakti : Bandung.

Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*

*dan Penerapannya*, Sturia Grafika : Jakarta.

Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumnid : Bandung.

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika : Jakarta.

Barda Nawawi. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo : Jakarta.

Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama : Bandung.

----- . 2008. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung.

P.A.F., Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea : Bogor.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo : Jakarta.

Wigianti Soetedjo. 2011. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama : Bandung.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 153 Ayat (3).

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Tentang Hak-hak Anak Tahun 1990.



**Sumber lain :**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana)

<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak/>

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>

# LAMPIRAN



## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 20 Juni 2016

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 245 /HKM/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

TASWIN.SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AFIF FADHLY  
No.Pokok : B11112105  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Alamat : Perdos Unhas Tamalanrea Blok H 20 Makassar.  
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1291/  
PID.SUS,ANAK/2014/PN.MKS)".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar,  
sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016,

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan  
dari Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 13 Juni 2016  
Nomor : 1112/UN45.3./PL.02/2016

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

